

DAFTAR RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
PADA DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI

Satker : DITTIPIDKOR
Tugas : Menyelenggarakan manajemen operasional pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	PENYEBAB	DAMPAK	Pengendalian yang ada	EFEKTIF/ KURANG	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
A	PERSONIL					
	Jumlah personil riil belum memadai untuk menangani perkara tindak pidana korupsi	Mutasi keluar tidak diikuti dengan penggantian	Lambannya penanganan perkara korupsi	Meminta perbantuan dari satuan kewilayahan untuk menugaskan anggota sebagai BKO di Dittipidkor	efektif	Meminta untuk memenuhi kekurangan personil
	Kompetensi dan ketrampilan penyidik belum memadai	Belum semua penyidik mengikuti Dik Bang Spes TP Korupsi	Penanganan perkara yang berlarut-larut	Melaksanakan pelatihan internal melalui latihan peningkatan kemampuan dan ketrampilan	efektif	Kerjasama dengan KPK untuk mengikutsertakan penyidik TP Korupsi dalam pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh KPK
B	ANGGARAN					
	Anggaran untuk penanganan TP Korupsi sudah ditentukan sebanyak 23 perkara pertahunnya, sedangkan penanganan TP Korupsi bisa lebih dari 23 perkara	Jumlah penanganan perkara TP Korupsi Polri sudah ditentukan jumlahnya oleh Srena Polri	Tidak dapat diselesaikannya perkara TP Korupsi	Mengefisienkan penggunaan anggaran yang ada untuk penyelidikan dan penyidikan TP Korupsi guna mendukung penanganan perkara berikutnya	efektif	Meminta penambahan jumlah penanganan TP Korupsi yang tadinya 23 perkara menjadi 30 perkara pertahunnya
	Anggaran untuk kegiatan pelacakan aset hasil dari korupsi, masih menggunakan anggaran lidik/sidik TP Korupsi	Belum ada tambahan anggaran untuk kegiatan lidik/sidik TPPU	Anggaran lidik/sidik TP Korupsi menjadi lebih besar karena diikuti dengan TPPU	Efisiensi lidik/sidik TP Korupsi agar lidik/sidik TPPU terakomodir	efektif	Menyarankan kepada Srena Polri agar adanya penambahan anggaran untuk lidik/sidik TPPU

C	MATERIAL					
	Bangunan kantor Dittipidkor saat ini masih di gedung Ombudsman	Gedung Bareskrim Polri masih proses pembangunan	Keamanan personil dan dokumen masih rentan	Meminta bantuan Yanma Polri untuk melakukan penjagaan di gedung Ombudsman khususnya kantor Dittipidkor lantai 1 dan 2	efektif	Pengamanan kantor dittipidkor selain penjagaan fisik akan dilakukan secara IT dengan memasang beberapa kamera CCTV
D	OPERASIONAL LIDIK/SIDIK TP KORUPSI					
	Penyusunan perencanaan lidik/sidik TP Korupsi yang belum fokus	Seluruh tim lidik/sidik belum terlibat seluruhnya dalam kegiatan penyusunan rencana lidik/sidik	Lamanya proses lidik/sidik	Dalam pengajuan sprin lidik/sidik harus dilampirkan rencana lidik/sidik	efektif	Mengikutsertakan seluruh tim lidik/sidik dalam penyusunan rencana lidik/sidik agar masing-masing orang mengetahui peran dan tugasnya masing-masing
	Intervensi pihak internal maupun eksternal terhadap penanganan perkara TP Korupsi	Tidak cukupnya informasi yang diterima pihak yang mengintervensi penanganan TP Korupsi	Penanganan perkara yang berlarut-larut	Setiap tahapan lidik/sidik penanganan TP Korupsi digelar, sehingga keputusan tertinggi ada pada persrta gelar perkara	efektif	Gelar Perkara dalam penanganan TP Korupsi merupakan kesepakatan bersama dengan menguji fakta dan alat bukti yang ada
	Penanganan perkara TP Korupsi yang tumpang tindih dengan Kejaksaan dan KPK	Ego sektoral dan berbagai kepentingan	Penanganan TP Korupsi tumpang tindih dan duplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan koordinasi antara Kejaksaan dan KPK <input checked="" type="checkbox"/> Mepedomani MoU Tahun 2012	kurang	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan koordinasi guna mewujudkan kesepakatan bersama dalam menangani TP Korupsi <input checked="" type="checkbox"/> Merevisi MoU Tahun 2012



Jakarta, Oktober 2016

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI